



## **The Role of Public Engagement in Achieving Sustainable Tourism: A Case Study of Bukik Tabuah Ecotourism**

**Syervina Nur Alfat\*<sup>1</sup>, Siska Sasmita <sup>2</sup>**

Email : [syervinanuralfat@gmail.com](mailto:syervinanuralfat@gmail.com)<sup>1</sup> [ssasmita@fis.unp.ac.id](mailto:ssasmita@fis.unp.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

### **ABSTRACT**

This study aims to explore public engagement as a determining factor in the management of sustainable tourism at Bukik Tabuah Ecotourism. The issue raised is how far the public plays an active role in control and development functions, in line with the participatory principles of ecotourism. Using a descriptive qualitative method and in-depth interviews with ecotourism managers, the Wali Nagari, and the local community, this research seeks to identify the concrete forms of such participation. The results show that public engagement at Bukik Tabuah is crucial and operational, manifested through an effective two-way dialogue mechanism. The main focus of public involvement is on socio-cultural control, which has led to firm agreements in the form of rules prohibiting illegal couples and the carrying of prohibited goods, emphasizing the community's role in maintaining local norms. Furthermore, engagement also includes the supervision role of the Nagari in monitoring potential social impacts and providing suggestions for infrastructure improvements (facilities and infrastructure). Although input is accommodated, its realization is gradual due to priority adjustments. Therefore, Bukik Tabuah Ecotourism proves that public engagement is not merely about conveying aspirations, but serves as a key instrument in maintaining cultural harmony, conducting oversight, and promoting sustainable community-based development.

**Keywords: Bukik Tabuah Ecotourism; Public Engagement; Tourism Management**

### **PENDAHULUAN**

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma sentral dalam pengembangan destinasi global, menuntut tercapainya keseimbangan antara manfaat ekonomi, kelestarian lingkungan, dan integritas sosial-budaya. Secara teoretis, implementasi model pembangunan yang berkelanjutan harus didukung oleh keterlibatan publik (*public engagement*) yang substantif, terutama dari masyarakat lokal yang menjadi pemilik wilayah dan penjaga nilai adat. Kegagalan dalam mengintegrasikan suara dan peran masyarakat secara efektif sering kali menjadi akar masalah ketidakberlanjutan, menyebabkan komersialisasi berlebihan, erosi budaya, hingga konflik sosial antara pengelola dan komunitas. *Public engagement* atau keterlibatan publik adalah proses di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Keterlibatan ini mencakup partisipasi terbuka, kolaborasi, dan interaksi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan bekerja sama dengan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung (Widya, 2021)

Di tingkat empiris, kawasan ekowisata berbasis komunitas di Indonesia, termasuk Ekowisata Bukik Tabuah, menghadapi tantangan mendasar untuk mentransformasikan prinsip partisipasi ini dari tataran regulasi menjadi praktik operasional harian. Arus wisatawan yang datang membawa keragaman nilai, yang berpotensi berbenturan dengan norma dan etika lokal. Oleh karena itu, muncul kebutuhan krusial untuk memahami bagaimana mekanisme *public engagement* berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, bukan sekadar formalitas, demi menjaga keharmonisan antara aktivitas wisata dan kelestarian identitas lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya partisipasi dalam sektor pariwisata. Misalnya, studi oleh Sururi (2019) menyoroti inovasi kebijakan partisipasi publik dalam pengelolaan ekowisata, sementara penelitian mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan (Suardana, 2016) menegaskan bahwa intervensi kebijakan harus melibatkan komunitas lokal. Kajian yang lebih luas terkait administrasi publik juga menekankan bahwa *public engagement* adalah kunci dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan (Thetanaya & Nurcholis, 2021). Studi-studi ini secara konsisten menyimpulkan bahwa partisipasi adalah prasyarat untuk legitimasi dan keberhasilan program. Namun, terdapat keterbatasan yang signifikan dalam literatur yang ada. Kebanyakan studi cenderung berfokus pada dimensi partisipasi yang bersifat formal, seperti keterlibatan pada tahap perencanaan, pembentukan struktur kelembagaan, atau distribusi manfaat ekonomi. Studi-studi ini seringkali belum secara spesifik dan mendalam menganalisis mekanisme operasional *public engagement* yang berfokus pada kontrol sosial-budaya dan pengawasan nilai lokal sebagai aspek krusial dari keberlanjutan sosial. Praktik partisipasi yang melahirkan aturan pengawasan moral dan adat di tingkat operasional harian ekowisata masih jarang terelaborasi secara empiris.

Kesenjangan utama dalam studi terdahulu adalah absennya kerangka analisis yang detail mengenai bagaimana *public engagement* diterjemahkan menjadi fungsi kontrol sosial yang terinstitusionalisasi dan responsif dalam konteks operasional ekowisata. Meskipun Permendagri No. 33 Tahun 2009 mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak, literatur masih lemah dalam menjelaskan bagaimana "pengendalian dampak sosial-budaya" tersebut diwujudkan secara konkret melalui dialog dan pengawasan langsung oleh masyarakat. Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan untuk mengkaji praktik di Ekowisata Bukik Tabuah, yang secara empiris telah menggunakan dialog dua arah untuk menetapkan aturan yang bersifat etis dan kultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tidak hanya mengkonfirmasi adanya partisipasi, tetapi juga dengan mengeksplorasi bentuk-bentuk spesifik dan dimensi mendalam keterlibatan publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi keterlibatan publik (*public engagement*) sebagai instrument vital dalam pengelolaan Ekowisata Bukik Tabuah. Pendekatan ini dipilih untuk dapat mendeskripsikan secara komprehensif mekanisme dialog, peran kontrol sosial, dan praktik partisipasi dari informan kunci. Subjek penelitian ditentukan secara purposive dan mencakup tiga kelompok utama: Pihak Pengelola Ekowisata, Perangkat Nagari Air Dingin, dan perwakilan masyarakat lokal yang terlibat aktif dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Lokasi penelitian ini adalah di Ekowisata Bukik Tabuah yang terletak di Kanagarian Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam berdasarkan pada panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya, yang menjadi teknik utama untuk menggali

perspektif informan mengenai praktik komunikasi publik, konsultasi publik, dan partisipasi publik. Teknik ini didukung oleh observasi dan dokumentasi. Data kualitatif yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan utama menurut Miles dan Huberman: reduksi data (penyaringan dan kategorisasi), penyajian data (penyusunan narasi deskriptif), dan penarikan kesimpulan (verifikasi dan penetapan makna). Keabsahan temuan dipastikan melalui triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai informan kunci

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Keterlibatan Publik dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Hasil analisis menegaskan bahwa praktik pelibatan masyarakat di lokasi ini bersifat substantif, melampaui formalitas administratif, dan beroperasi melalui model dialogis yang efektif dalam memproduksi kontrol sosial-budaya. Pembahasan utama akan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretis Rowe dan Frewer (2005) dan relevansinya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009. Keterlibatan publik di Ekowisata Bukik Tabuah dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama, menunjukkan adanya spektrum partisipasi dari yang paling rendah (informasi) hingga yang paling tinggi (pengambilan keputusan bersama).

#### Komunikasi Publik (Public Communication)

Dimensi *Public Communication* di Bukik Tabuah diwujudkan sebagai aliran informasi searah dari pengelola kepada publik, yang berfokus pada sosialisasi aturan dan kebijakan kawasan. Fungsi komunikasi ini bersifat penting karena ia menjadi jembatan antara keputusan yang telah dibuat secara partisipatif (oleh komunitas dan pengelola) dengan pihak eksternal, terutama wisatawan. Melalui komunikasi publik, pengelola memastikan bahwa norma dan etika lokal yang dihasilkan dari konsensus internal disebarluaskan dan dipahami sebagai batasan perilaku yang mengikat.

Contoh empiris yang kuat adalah penyampaian informasi mengenai larangan membawa barang-barang terlarang seperti narkoba dan alkohol, serta aturan ketat mengenai larangan pasangan yang bukan muhrim atau tidak sah untuk berduaan di area wisata. Meskipun substansi aturan ini lahir dari Partisipasi, mekanisme penyampaiannya kepada pengunjung yang beragam merupakan bentuk *public communication*. Efektivitas komunikasi ini menentukan seberapa baik norma lokal dapat ditegakkan di tengah keragaman pengunjung, menjadikannya garis pertahanan pertama dalam menjaga integritas sosial-budaya kawasan dari dampak negatif pariwisata.

#### Konsultasi Publik (Public Consultation)

Konsultasi publik merupakan mekanisme di mana informasi mengalir searah dari publik kepada pengelola dalam bentuk penyampaian aspirasi, saran, atau masukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi ini sangat aktif dalam dua area krusial, menunjukkan bahwa masyarakat tidak ragu memberikan input yang bersifat teknis maupun etis.

Pertama, konsultasi diwujudkan dalam saran-saran terkait perbaikan sarana dan prasarana. Masukan dari masyarakat sekitar mengenai perbaikan infrastruktur jalan yang dulunya kerikil dan kini dibeton, menggarisbawahi peran masyarakat sebagai *eyes and ears* pengelola ekowisata yang mampu mengidentifikasi hambatan operasional paling mendasar. Respon pengelola, meskipun tidak instan dan memerlukan proses penyesuaian dengan sumber daya dan prioritas, menunjukkan bahwa konsultasi ini diakui dan dipertimbangkan. Ini mencerminkan akuntabilitas pengelola terhadap kebutuhan praktis masyarakat demi kelancaran ekowisata.

Kedua, konsultasi publik juga terjadi dalam bentuk pengawasan dan masukan terkait dampak sosial-budaya yang diberikan oleh pihak Pemerintahan Nagari. Masukan ini berfungsi

sebagai *early warning system*, mengingatkan pengelola akan risiko yang timbul akibat keragaman pengunjung, terutama pada jam-jam malam. Masukan ini menegaskan bahwa pihak Nagari memandang diri mereka sebagai pemegang otoritas moral dan budaya yang wajib memberikan input untuk menjaga nilai-nilai lokal kepada pihak pengelola yaitu Koperasi Prodesen Serba Usaha Solok Radjo.

### **Partisipasi Publik (Public Participation)**

Partisipasi publik merupakan dimensi keterlibatan yang paling tinggi dan paling instrumental di Bukik Tabuah, di mana terjadi dialog dua arah (*two-way dialogue*) yang menghasilkan keputusan bersama (*joint decision-making*) yang mengikat. Inilah inti dari pengelolaan ekowisata yang berbasis komunitas.

Wawancara dengan pihak pengelola menegaskan bahwa aturan etika dan larangan di kawasan adalah hasil diskusi antara masyarakat dan pihak ekowisata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berstatus sebagai konsultan, melainkan mitra pengambil keputusan dalam ranah kontrol sosial. Adanya aturan larangan yang spesifik dan sensitif terhadap nilai lokal (larangan berduaan bagi pasangan tidak sah) merupakan bukti empiris paling kuat dari kekuatan *social control* yang diinstitusionalisasi. Masyarakat menggunakan mekanisme partisipasi ini untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak merusak tatanan sosial yang telah ada. Dengan demikian, *public participation* di Ekowisata Bukik Tabuah efektif mentransformasi masyarakat dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki hak veto dan kontrol penuh terhadap integritas kawasan.

### **Relevansi Keterlibatan Publik (Public Engagement) dengan Permendagri No. 33 Tahun 2009**

Model *public engagement* yang komprehensif di Ekowisata Bukik Tabuah memiliki relevansi yang sangat kuat dan koheren dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Permendagri tersebut secara eksplisit mengamanatkan pelibatan masyarakat lokal dalam tiga tahapan pengembangan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak yang ditimbulkan.

Fungsi Pengendalian Dampak (Kontrol Sosial-Budaya): Aspek yang paling menonjol dari *public engagement* di Ekowisata Bukik Tabuah adalah peranannya dalam pengendalian dampak. Dimensi *Public Participation* (dialog dua arah) yang melahirkan aturan-aturan larangan adalah wujud nyata dari upaya pengendalian dampak sosial-budaya yang diamanatkan regulasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menetapkan larangan (misalnya, larangan pasangan tidak sah) menunjukkan bahwa Permendagri No. 33 Tahun 2009 diterjemahkan bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai praktik operasional yang memberikan wewenang kontrol kepada komunitas. Model ini secara efektif menempatkan keseimbangan ekologis sosial di atas orientasi ekonomi semata.

Fungsi Pelaksanaan dan Perencanaan (Partisipatif): Selain pengendalian dampak, keterlibatan publik dalam dimensi *Public Consultation* (masukan infrastruktur) dan *Public Participation* (struktur pengelola yang diwadahi Koperasi Solok Radjo) juga mencerminkan pelibatan dalam tahap pelaksanaan dan perencanaan. Proses adaptasi dan penyesuaian saran yang bersifat bertahap oleh pengelola menunjukkan adanya integrasi antara otoritas pengelola formal dengan aspirasi publik.

## **KESIMPULAN**

Keterlibatan publik (*public engagement*) dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Ekowisata Bukik Tabuah terbukti sangat efektif dan substantif, mencapai level Partisipasi Publik (*Public Participation*) yang tinggi berdasarkan teori dari Rowe dan Frewer, melampaui dimensi *Public Communication* dan *Public Consultation* semata. Model ini ditandai dengan

mekanisme dialog dua arah yang menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek penentu keputusan, bukan hanya penerima informasi, terwujud dalam pembentukan aturan-aturan kawasan. Hasil paling signifikan dari keterlibatan ini adalah lahirnya kontrol sosial-budaya yang mengikat terlihat dari penetapan larangan pasangan tidak sah dan barang terlarang yang berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjaga harmoni nilai lokal di tengah keragaman pengunjung. Keberhasilan ini secara langsung memenuhi amanat Permendagri No. 33 Tahun 2009, khususnya dalam aspek pengendalian dampak sosial-budaya, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi pariwisata tidak mengorbankan integritas dan norma yang dipegang teguh oleh masyarakat di Nagari Air Dingin

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pihak pengelola Ekowisata Bukik Tabuah terus mempertahankan dan memperkuat mekanisme dialog dua arah yang sudah berjalan, menjadikannya sebagai fondasi permanen dalam setiap kebijakan operasional. Secara praktis, pengelola perlu menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang transparan untuk menindaklanjuti masukan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur (Public Consultation), sehingga proses realisasi yang bersifat bertahap dapat dikomunikasikan secara efektif dan tidak menimbulkan kesenjangan harapan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap dampak jangka panjang dari aturan kontrol sosial-budaya yang partisipatif ini terhadap tingkat kepuasan wisatawan dan ketahanan budaya masyarakat lokal. Selain itu, studi komparatif dengan kawasan ekowisata lain yang memiliki tantangan budaya serupa dapat dilakukan untuk memformulasikan model public engagement yang lebih universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rita Fiantika, F., Ambarwati, K., & Anita, M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2005). A Typology of Public Engagement Mechanisms. *Science Technology and Human Values*, 30(2), 251–290. <https://doi.org/10.1177/0162243904271724>
- Suardana, I. wayan. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata ( Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali ). *Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan*, April, 1–26.
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang). *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 110. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1905>
- Thetanaya, & Nurcholis, C. (2021). Public Engagement in Agrarian Conflict Resolution. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 170–193. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13190>
- Widya, A. R. (2021). Meningkatkan Keterlibatan Publik secara Online pada Era Open Government di Media Sosial (Studi Analisis Isi Akun Instagram Badan Pusat Statistik). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 23(2), 185–198. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.23.2.2021.185-198>